



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS**

SKRIPSI

**ANALISIS SISTEM ADMINISTRASI PAJAK REKLAME
KOTA SUNGAI PENUH
(Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Daerah Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi)**

Oleh :

**EDY FIRZA
06 953 020**

Mahasiswa Program Strata Satu (S-1) Jurusan Akuntansi

*Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi*

**PADANG
2010**



No Alumni Universitas

EDY FIRZA

No Alumni Fakultas

BIODATA

a). Tempat / Tgl Lahir : Lolo Kecil / 05 Januari 1989 b). Nama Orang Tua : Pakhrudin, S.Pd, MM dan Iriani, S.Pd c). Fakultas : Ekonomi d). Jurusan : Akuntansi e). No.Bp : 06953020 f). Tanggal Lulus : 31 Juli 2010 g). Prediket lulus : Sangat Memuaskan h). IPK : 3,44 i). Lama Studi : 3 tahun 11 bulan j). Alamat Orang Tua : Desa Lawang Agung Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi

ANALISIS SISTEM ADMINISTRASI PAJAK REKLAME KOTA SUNGAI PENUH (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi)

Skripsi S-1 Oleh Edy Firza , Pembimbing : *Suhanda, SE, M.Si Ak*

ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar dan berperan penting untuk membiayai pembangunan di Indonesia. Salah satu pajak yang dipungut oleh negara adalah pajak reklame yang merupakan salah satu jenis pajak daerah. Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame dapat dilakukan melalui perbaikan terhadap sistem administrasi pajak reklame. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti meneliti lebih lanjut mengenai efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak reklame tahun 2009 dan 2010 Kota Sungai Penuh. Adapun Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya penyempurnaan sistem administrasi pajak reklame yang dapat diukur melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak reklame Kota Sungai Penuh (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sungai Penuh). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian diskriptif analitis kualitatif dan teknik analisis data dengan menggunakan *Cost Of Collection Efficiency Ratio* (Rasio Efisiensi Biaya Pemungutan) dan *Tax Performance Index* (Indeks Kinerja Pemungutan Pajak). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Pemungutan Pajak Reklame Kota sungai Penuh adalah sangat efisien dan sangat efektif.

Kata Kunci :Pajak Reklame, Sistem Administrasi Pajak Reklame

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 31 Juli 2010, telah disetujui oleh penguji :

Tanda Tangan	1.	2.	3.
Nama Terang	Drs. Amsal Djunid, M.Bus, Ak	Dra. Sri Dewi Edmawati, M.Si, Ak	Suhanda, SE, M.Si, Ak

Mengetahui :

Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. H. Yuskar, SE, MA, Ak
NIP. 196009111986031001

Tandatangan

Alumnus telah mendaftar ke fakultas dan telah mendapat Nomor Alumnus :

	Petugas Fakultas / Universitas	
No Alumni Fakultas	Nama:	Tanda tangan :
No Alumni Universitas	Nama:	Tanda tangan :

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera yang merata baik materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, adil, dan makmur. Menurut Todaro (2003), bahwa pembangunan adalah harus diartikan sebagai suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap-sikap mental yang terbiasa dan lembaga-lembaga nasional, termasuk pula percepatan atau akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan, dan pemberantasan kemiskinan absolut.

Untuk bisa menciptakan suatu bangsa yang sejahtera, negara membutuhkan dana yang tidak sedikit guna membiayai keperluan pembangunan dalam arti luas. Pemasukan dana yang diperoleh oleh negara berasal dari dua sumber, yaitu penerimaan dalam negeri dan bantuan luar negeri. Penerimaan dalam negeri diperoleh dari penerimaan minyak dan gas, penerimaan pajak dan bukan pajak. Sedangkan bentuk bantuan dari luar negeri adalah bantuan program dan bantuan proyek. Tentu saja dalam hal penerimaan, yang akan lebih diutamakan adalah penerimaan yang berasal dari dalam negeri. Dengan demikian peningkatan penerimaan dalam negeri disamping dimaksudkan untuk mendukung peningkatan laju pembangunan, juga dimaksudkan secara bertahap memperbaiki struktur sumber pembiayaan negara dengan mengurangi ketergantungannya pada sumber luar negeri.

Sumber dana dari dalam negeri diperoleh dari pendapatan yang berasal dari pusat maupun yang berasal dari daerah. Untuk mengurangi ketergantungan dana yang diperoleh dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus mampu menggali sumber-sumber yang potensial yang berasal dari daerahnya sendiri melalui pendapatan asli daerah (PAD).

Pemerintah mengambil kebijakan untuk mengambil keputusan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Berkaitan dengan pemerintah daerah dan keuangan daerah pemerintah pusat memberikan kewenangan dan hak bagi pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur keuangan daerahnya sendiri secara mandiri dan ini diwujudkan dalam UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, dan UU No.34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Untuk lebih mengoptimalkan potensi keuangan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, maka pemerintah daerah diharapkan untuk mampu menggali segenap potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut berdasarkan asas keadilan dan asas manfaat (Syamsi, 1993).

Kemampuan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka otonomi daerah merupakan hal yang bersifat urgent. Kaho (1999) mengatakan bahwa keuangan daerah merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam melaksanakan pemerintahan secara baik. Untuk dapat mewujudkan kemampuan keuangan daerah yang baik, maka diperlukan sumber daya yang memadai. Setiap daerah terutama daerah tingkat-II, memiliki perbedaan kontribusi masing-masing pos penerimaan pada pendapatan asli daerah (PAD).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dan analisis yang telah dilaksanakan dengan menggunakan metode analisis untuk menilai efisiensi dan efektivitas administrasi pajak reklame di DPPKAD Kota Sungai Penuh dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Kota Sungai Penuh cukup baik, hal ini dapat dilihat dari beberapa proses pelaksanaan pemungutan pajak reklame Kota Sungai Penuh sebagai berikut:

- a. Perizinan dan Penerbitan

Sebagai upaya untuk mempermudah proses perizinan dan penerbitan untuk pajak reklame maka melalui Peraturan Daerah Nomor 62 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pajak Reklame yang menetapkan bahwa dalam proses perizinan reklame hanya ada dua instansi yang terlibat yaitu DPPKAD dan Dinas Tata Kota Sungai Penuh. DPPKAD bertanggung jawab mengenai proses perizinan dan pajak reklame sedangkan Dinas Tata Kota bertanggung jawab atas keindahan kota.

- b. Pendataan dan Pemeriksaan

Pendataan reklame dilakukan dengan berbagai cara antara lain *door to door operation* yaitu dengan menyerahkan sebanyak mungkin petugas ke lapangan dan mencatat setiap reklame yang

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Khairil. 2001. *Penerapan Administrasi Pajak Reklame Dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Reklame*. Tesis. Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Indonesia
- Davey, Kenneth J. 1989. *Pembiayaan Pemerintah Daerah*. Jakarta: UI Press
- Devas, Nick, dkk. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Donald. 2008. *Beda Pajak Pusat dan Pajak Daerah*. (<http://www.google.com/bedapajakdaerahanpajakpusat<<blogkutuk.htm/diakses> 18 Maret 2010)
- Handayani, Sri. 2009. *Evaluasi Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Klaten*. Skripsi. Surakarta: Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Huseini, Martani, dan SB Hari Lubis. 1987. *Teori Organisasi: Suatu Pendekatan Makro*. Jakarta
- Kabupaten Kerinci. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Pajak Reklame
- Kota Sungai Penuh. Peraturan Daerah Nomor 62 Tahun 2009 Tentang Pajak Reklame
- Lutfi, Achmad. 2006. *Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah : Suatu upaya dalam optimalisasi penerimaan PAD*, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi : Bisnis & Birokrasi, Volume XIV, Nomor 1, Januari 2006. Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia
- Lumbantoruan, Sophar. *Ensiklopedi Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1997.